

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN SISWA PUTUS  
SEKOLAH TINGKAT MENENGAH DI KABUPATEN BATANG**

Oleh:

Arief Tri Atmoko

(14010110130126)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*Abstract*

**One of the problems that hinder the development of educational today is Dropout. Dropout is a condition in which a student stops in running the education or no longer attending school for any reason. With high rates of school dropouts can cause other problems in all aspects of state next period. In Batang poor condition of high school is still seen from the Gross Enrollment Rate which is still below 50%, and is one of the causes of dropouts.**

**This study used qualitative methods to understand and interpret the meaning of an event interaction of human behavior in certain situations according to the researcher's own perspective. The data collection techniques that use in this study are interviews, and literature.**

**The results showed that to overcome the problem of dropouts at the high school in Batang central government, provincial governments and local governments work together to resolve the problem by issuing policies BSM, BKKM and BKTMB. In the policy implementation is based on the research is considered good enough to see the implementation of the policy variables. Then for the causes of dropout found 6 factors that cause students Delinquency factor, Loss Motivation Factor, Academic Factors, Economic Factors, Schools Distance Factor and Adaptation Capabilities Factors. However, government policies focused on economic factors alone.**

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu yang menjadi fokus setiap pemerintahan di seluruh Negara di dunia karena pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya keberlangsungan kehidupan bangsa dan Negara. Di Indonesia pendidikan merupakan Hak dari segenap rakyat Indonesia dan sekaligus menjadi Kewajiban Negara atau dalam arti lain yaitu Pemerintah, yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang tersirat dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>1</sup>

Selain itu juga pada pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi :

Ayat 1 : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Ayat 2 : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Ayat 3 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat 4 : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.”

---

<sup>1</sup> UUD RI 1945

Ayat 5 :“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia.”<sup>2</sup>

Negara dalam arti sebagai pemerintah dalam UUD1945 dalam pasal 31 ayat 3,4 dan 5 ini merupakan suatu lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Indonesia, dimana pemerintah yang membuat aturan dalam pendidikan dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan negara lewat anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia.Selain itu juga pemerintah memiliki peran untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi pada dasarnya kewajiban menyelenggarakan pendidikan Indonesia berada ditangan pemerintah.

Setelah berfokus pada pendidikan dasar yaitu WAJAR DIKDAS dengan mewajibkan setiap warga negara untuk menempuh pendidikan dasar 9 tahun, kini pemerintah Indonesia berfokus ke tingkatan diatasnya yaitu pendidikan menengah atau pendidikan 12 tahun.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dapat dikatakan telah tuntas wajib belajar 9 tahun dengan Indikator yang dipakai pemerintah untuk mengukur ketercapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang telah bisa dikatakan tuntas wajib belajar 9 tahun, dimana Angka Partisipasi Kasar dari Kabupaten Batang lebih dari 90%. Akan

---

<sup>2</sup> Ibid

tetapi lain halnya dengan tingkat menengah dimana APK masih sangat rendah dibanding dengan kabupaten atau kota lain Jawa Tengah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Batang tidak bersekolah, salah satu penyebab adalah putus sekolah pada tingkat menengah.

Pada tahun 2011 berdasarkan data BPS angka putus sekolah di Kabupaten Batang pada tingkat menengah 4,59%, lebih tinggi dibanding Kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pemalang di atas rata-rata angka putus sekolah Jawa Tengah. Selain itu persebaran siswa putus sekolah tingkat menengah tidak merata.

Untuk mengentaskan masalah putus sekolah pada tingkat menengah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Batang saling bersinergi dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (BKKM) dan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu yang Berprestasi (BKTMB).

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan Anak Putus Sekolah tingkat menengah dan faktor yang menyebabkan Anak Putus Sekolah pada tingkat menengah di Kabupaten Batang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang**

Untuk mengatasi masalah putus sekolah pada tingkat menengah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pememerintah Daerah Kabupaten Batang mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, yaitu :

#### **1. Bantuan Siswa Miskin (BSM)**

BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

#### **2. Bantuan Beasiswa untuk Keluarga Kurang Mampu (BKKM)**

BKKM meupakan salah satu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah termasuk juga Kabupaten Batang yang penggunaanya dialokasikan untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA/SMK) di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa tingkat menengah yang kesulitan pembiayaan sekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu yang masih duduk di kelas X dan XII.

### 3. Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu tapi Berprestasi (BKMTB)

Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu tapi Berprestasi (BKMTB) adalah beasiswa yang diberikan bagi mereka yang berprestasi akan tetapi tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai sekolah pada tingkat menengah. BKMTB bertujuan untuk menyelamatkan generasi-generasi berprestasi pada tingkatan menengah di Kabupaten Batang dari ancaman putus sekolah akibat tidak mampu membiayai sekolah.

## **B.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang**

Dari ketiga kebijakan tersebut jika secara keseluruhan Implementasinya dikatakan **CUKUP BAIK** dilihat dari variabel Implementasi menurut Edward III yaitu :

#### a. Komunikasi

Dalam transmisi komunikasi dari Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang dilakukan dengan dua tahap yaitu sosialisasi dari DISDIKPORA kepada pihak sekolah kemudian dilanjutkan sosialisasi sekolah terhadap para siswa. Pada tahap pertama dilakukan melalui rapat kepala sekolah dan tahap kedua dilakukan langsung kepada siswa oleh wali kelas dan guru BK. Akan tetapi sosialisasi ini dianggap masih kurang karena tidak ada media lain seperti pada papan pengumuman yang bisa memudahkan sosialisasi.

Kejelasan informasi dalam komunikasi pada tahap pertama DISDIKPORA telah melaksanakan sosialisasi secara jelas begitu pula pada tahap kedua yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu wali kelas dan guru BK sehingga informasi yang disampaikan juga sampai kepada siswa dengan jelas dan terperinci. Adapun yang menjadi hambatan dalam kejelasan penyampaian informasi ini yaitu pada siswa yang malu karena kurang mampu.

Komunikasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang dilakukan secara konsisten, baik tahap awal maupun tahap kedua dilakukan setahun sekali mengikuti aturan yang ada. Untuk sosialisasi dari sekolah apabila diperlukan sosialisasi pihak BK siap membantu siswa yang membutuhkan beasiswa.

b. SumberDaya

Sumberdaya manusia dalam Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang dari sisi kuantitas untuk dari DISDIKPORA masih kekurangan SDM, hal tersebut dapat dilihat dari Staff SMP membantu mengurus beasiswa pendidikan menengah. Kemudian untuk pelaksana dari sekolah dianggap sudah cukup jumlahnya. Dari segi kualitas baik dari DISDIKPORA dan pihak sekolah sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan kebijakan.

Dana kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang dikelola dengan baik oleh DISDIKPORA dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi untuk ketersediaan dana dianggap kurang karena dana yang tersedia tidak mencukupi semua yang mendaftar beasiswa. Selain itu dengan adanya beasiswa ini bisa membantu meringankan beban biaya siswa kurang mampu tetapi belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah yang lain yang belum terpenuhi.

c. Disposisi

Komitmen pelaksana kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah baik dari pihak DISDIKPORA sangat mendukung dengan menyalurkan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan untuk pihak sekolah juga mendukung dengan mengatur dan mengawasi penggunaan beasiswa para siswanya.

Untuk sikap kejujuran pelaksana sudah jujur dengan mengawasi agar beasiswa dapat sampai ke tangan yang benar dan digunakan untuk kebutuhan sekolah.

d. Struktur Birokrasi

Masing-masing program beasiswa memiliki petunjuk pelaksanaan masing-masing dan sudah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan tersebut. Tiga beasiswa memiliki fragmentasi yang berbeda. BSM memiliki fragmentasi yang paling luas karena merupakan program nasional, kemudian



BKKM yang merupakan kebijakan provinsi dan BKTMB yang paling sempit karena merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Batang.

### **B.3 Faktor penyebab siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang**

Untuk faktor-faktor penyebab putus sekolah dari hasil penelitian ada 5 faktor penyebab putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang yaitu kenakalan siswa, kehilangan motivasi belajar, akademik, ekonomi keluarga dan kemampuan adaptasi. dari data tersebut menunjukkan beragamnya faktor yang menyebabkan putus sekolah di Kabupaten Batang.

Melihat Faktor tersebut jika dibandingkan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Batang dianggap kurang tepat. Dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang, pemerintah lebih menekankan kebijakan yang lebih untuk menangani putus sekolah yang disebabkan karena faktor keadaan ekonomi keluarga yaitu meliputi :

1. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
2. Beasiswa Bantuan Keluarga Kurang Mampu (BKKM)
3. Beasiswa bagi keluarga Tidak Mampu yang Berprestasi (BKTMB)

Hal tersebut dilakukan karena kemiskinan masih menjadi prioritas utama yang berpengaruh kesemua sector termasuk pendidikan termasuk masalah kemiskinan yang menyebabkan putus sekolah.karena tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini masih tinggi, termasuk di Kabupaten Batang.

Padahal dari penelitian yang ditemukan sebagai penyebab putus sekolah tingkat menengah paling besar adalah kenakalan remaja. Faktor ekonomi yang ditemukan dalam penelitian tidak menjadi faktor utama melainkan hanya faktor sekunder.

Sehingga apabila melihat fakta tersebut pemerintah seharusnya melihat faktor lainya sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan mengenai pengentasan putus sekolah. Dengan kebijakan yang masih berfokus pada faktor keadaan ekonomi saja dirasa belum cukup untuk menanggulangi masalah putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang ini, karena ada faktor lainya yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat kebijakan. Diharapkan nantinya ada kebijakan untuk menangani faktor-faktor lain tersebut sehingga nantinya akan tercapai Kabupaten Batang bebas dari anak putus sekolah baik seluruh tingkat atau khususnya tingkatan menengah.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Simpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi masalah putus sekolah pada tingkat menengah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, yaitu :

- Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- Bantuan Beasiswa untuk Keluarga Kurang Mampu (BKMM)
- Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu tapi Berprestasi (BKMTB)

Dalam Implementasinya kebijakan berdasarkan penelitian dianggap cukup baik dengan melihat variabel implementasi dalam kebijakan tersebut. Kemudian untuk faktor penyebab putus sekolah ditemukan 6 faktor penyebabnya yaitu Faktor Kenakalan Siswa, Faktor Kehilangan Motivasi Belajar, Faktor Akademik, Faktor Ekonomi Keluarga, Faktor Jarak Sekolah dan Faktor Kemampuan Adaptasi. Akan tetapi kebijakan pemerintah masih berfokus pada faktor ekonomi saja.

## **C.2 Saran**

Dari pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang peneliti merekomendasikan beberapa solusi sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Beasiswa kepada masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Batang ini harus dilakukan sosialisasi beasiswa langsung kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa mengetahui adanya beasiswa atau bantuan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan mereka tahu adanya beasiswa pada jenjang menengah maka bagi mereka yang kurang mampu akan bisa terus melanjutkan pendidikannya.

2. Menambah media sosialisasi

Dari penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah ini dilakukan hanya melalui media tatap muka. Untuk memperluas akses kepada masyarakat

dperlukan media lain seperti sosdialisasi melalui papan pengumuman, radio atau media lainnya.

3. Penambahan sumber daya manusia bidang pendidikan menengah

Dalam penelitian ini diketahui karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan ketiga beasiswa ini Kasie SMA dan SMK masih dibantu oleh Kasie Bagian SMP dan Staff Bagian SMP. Maka dari itu untuk mendukung kebijakan perlu penambahan sumber daya manusia untuk membantu mengurus bidang menengah (SMA dan SMK).

4. Penambahan alokasi untuk beasiswa

Dari penelitian ini ditemukan bahwa beasiswa masih dianggap kurang karena dari ketiga beasiswa antara kuota beasiswa dan jumlah siswa yang mendaftar beasiswa lebih banyak yang mendaftar, sehingga menyebabkan ada siswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Maka dari itu diharapkan pemerintah untuk menambah alokasi dana untuk beasiswa.

5. Membuat petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas dalam BKTMB

Dalam penelitian ini diketahui bahwa untuk program BKTMB ini tidak memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas. Untuk kelancaran kebijakan harus dibuat petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk program BKTMB ini.

6. Menambah kebijakan pengentasan putus sekolah karena faktor lain

Dari penelitian ini ditemukan banyak faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah tingkat menengah di kabupaten Batang. Akan tetapi kebijakan dari pemerintah masih berfokus pada kebijakan untuk pengentasan siswa putus sekolah karena faktor ekonomi. Untuk mengentaskan siswa

putus sekolah ini diperlukan kebijakan selain kebijakan karena faktor ekonomi saja. Maka dari itu diharapkan pemerintah membuat kebijakan dalam menanggulangi faktor lainnya seperti kenakaln remaja dan lainnya.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul kahar Badjuri dan Teguh Yuwono. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Irfan M. Ismaly. (2004) *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Karsini. (1997). *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT. Anem Kosong Anem.
- Leo, Agustino, (2006). *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J., Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho D. Riant. (2007). *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Ngalim. (1995). *Ilmu Pendidikan teoritis dan Praktis*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *Implementasi kebijakan transformasi pikiran G. Edwards*. Jogjakarta: YPAPI.
- Tim Penyusun. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Uyoh, Sdulloh. (1994). *Pengantar Filsafat Pendidikan* . Bandung : PT. Media Iptek.
- Wahab, Solichin Abdul. (1990). *Pengantar analisis kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samudra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Cetakan Kedua*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : teori & proses*. Yogyakarta: PT. BUKU KITA.

Winarno, Budi. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Peraturan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Panduan Pelaksanaan Bantuan siswa Miskin APBNP 2013

Pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan 2014

**Internet :**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> diunduh pada 21.44 WIB 20/05/2013

[http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com\\_content&task=view&id=712&Itemid=712](http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=712) diunduh pada 21.44 WIB 20/05/2013

[http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com\\_content&task=view&id=711&Itemid=711](http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=711) diunduh pada 21.44 WIB 20/05/2013

<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/> pada 20.01 WIB 29/05/2014